

Pembiayaan ulang (refinancing) pembangunan pembangkit listrik melalui akad musyarakah mutanaqisah = Refinancing of development of powerplant through musyarakah mutanaqisah agreement

Kaisar Wiranegara, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20485183&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini memaparkan penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam produk Pembiayaan Ulang (Refinancing) Pembangunan Pembangkit Listrik. Dalam penelitian ini penulis meneliti kesesuaian penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dengan perundang-undangan dan fatwa DSN mengingat bahwa Pembiayaan murabahah dan ijarah sampai dengan saat ini menjadi skema pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Melalui skema murabahah nasabah membutuhkan sejumlah dana untuk membeli aset tertentu, dan untuk itu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli aset tersebut melalui pihak bank untuk selanjutnya nasabah akan membayarnya secara menyicil. Dalam suatu pembiayaan murabahah, kondisi perekonomian yang selalu berubah mempengaruhi kondisi usaha nasabah, kondisi tersebut dapat menjadikan kemampuan nasabah untuk membayar utang murabahah menjadi berkurang atau nasabah membutuhkan tambahan modal untuk menyesuaikan usahanya dengan kondisi yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan dalam suatu pembiayaan yang sedang berjalan, nasabah mengajukan pembiayaan ulang (refinancing). Prinsip dalam transaksi berdasarkan syariah adalah adanya underlying asset yang menjadi dasar transaksi, oleh karena itu skema murabahah tidak dapat digunakan untuk membiayai ulang/melunasi pembiayaan murabahah sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk proses refinancing adalah melalui penerapan akad musyarakah mutanaqisah.

This thesis describes the application of Musharaka Mutanaqisah contract in the product of Refinancing the Development of Power Plants. In this study the authors examined the suitability of the application of the Musyarakah Mutanaqisah contract with legislation and DSN fatwa given that the financing of murabahah and ijarah up to now is the most widely used financing scheme for Islamic banking in Indonesia. Through the murabahah scheme, the customer requires a number of funds to buy certain assets, and for that the customer submits a request to the bank to buy the asset through the bank and the customer will pay it in installments. In a murabahah financing, the changing economic conditions affect the customer's business condition, this condition can make the ability of customers to pay murabahah debt to be reduced or customers need additional capital to adjust their business to the existing conditions. Based on this, it is possible for an ongoing financing, the customer proposes refinancing. The principle in sharia-based transactions is the existence of an underlying asset that is the basis of the transaction, therefore the murabahah scheme cannot be used to refinance / repay the murabahah financing beforehand. Based on this, one of the solutions that can be applied to the refinancing process is through the application of the mutanaqisah musyarakah agreement.